

### Bab III

#### Gejolak Penurunan Paksa Muhammad Mursi Sebagai Presiden Mesir Dalam Fenomena Arab Spring

##### A. Sejarah Singkat Mesir dan Arab Spring

Mesir merupakan negara dengan letak geopolitik yang sangat strategis, ia terletak pada persimpangan jalan antara Afrika dan Asia, ditambah dengan tanahnya yang subur. Pada masa lampau, daerah seperti Mesir merupakan daerah yang sangat banyak peminatnya, terkhusus para penakluk dan negara-negara besar. Arti strategis Mesir bertambah lagi dengan dibuatnya Terusan Suez pada tahun 1869. Meskipun milik swasta, terutama maskapai Prancis, secara strategis berada di bawah kontrol Inggris yang menyadari kepentingan terusan ini bagi kepentingan imperiumnya.<sup>152</sup>

Dua dekade terakhir abad ke-19, Inggris menjadi penguasa seluruh Lembah Nil. Kepentingannya di Mesir diwakili oleh seorang negarawan ulung, Lord Cromer. Ia menata Mesir dengan administrasi fiskal yang baik, memperbaiki irigasi, dan membantu Mesir untuk memiliki kedudukan komersial terkemuka di antara negara-negara Timur Tengah lainnya. Selanjutnya, posisinya digantikan oleh Sir Eldon G (1907-1911) dan Lord Kitchener (1911-1914), dan untuk

---

<sup>152</sup> Lenczowski, G. (1993). *Timur Tengah di Tengah Kancah Dunia*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. Hlm. 298

melanjutkan dominasi Inggris yang tak tergoyahkan di Mesir, yang secara resmi diperintahkan oleh seorang *khadif*.<sup>153</sup>

Pada tanggal 18 Desember 1914, Inggris meresmikan Mesir sebagai negara protektoratnya, guna memperjelas struktur formal Inggris atas Mesir.<sup>154</sup>

Dan pada tanggal 29 Februari 1922, Inggris memutuskan untuk mengambil tindakan sepihak dalam suatu pernyataan komisaris tinggi, untuk mengakhiri protektoratnya atas Mesir, sekaligus memperoklamasikan kemerdekaan Mesir. Hal ini terjadi dikarenakan mulai bangkitnya nasionalisme rakyat Mesir atas negaranya.<sup>155</sup>

Akan tetapi, meskipun Inggris secara resmi memutuskan untuk mengakhiri protektoratnya atas Mesir, sifat kontrol dan intervensi Inggris atas Mesir masih terus berlanjut. Bayang-bayang imperium Inggris atas Mesir terus saja bergulir. Yang mengakibatkan kedaulatan masyarakat Mesir atas negaranya dapat dibilang seperti kedaulatan semu, karena setiap aktivitas politik masyarakat Mesir harus dalam sepengetahuan imperium Inggris dan dalam kontrol imperium Inggris. Intervensi serta kontrol Inggris atas Mesir mulai berkurang setelah Nokrashi membawa persoalan Inggris- Mesir ke hadapan PBB pada bulan Juli 1947.<sup>156</sup>

Pada masa protektorat Inggris hingga tahun 1952, Mesir menganut sistem pemerintahan monarkhi, dimana kepala negara di pimpin oleh seorang Raja atau Sultan dan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Pasca tahun 1952,

---

<sup>153</sup> Loc.cit

<sup>154</sup> Ibid. Hlm 299

<sup>155</sup> Ibid. Hlm 300

<sup>156</sup> Ibid. Hlm 313

Mesir beralih kepada sistem pemerintahan demokrasi dengan negara republik, dimana kepala pemerintahannya adalah presiden. Peralihan tampuk pemimpin kekuasaan yang terjadi di Mesir hampir sebagian besar diselimuti dengan penurunan paksa, baik itu pembunuhan terhadap kepala pemerintahan maupun menurunkan paksa dengan cara mengundurkan diri.

Setidaknya ada tiga kepala pemerintahan Mesir yang diturunkan paksa dengan cara dibunuh. *Pertama*, Dr. Ahmed Maher Pasha. Ia dibunuh oleh seorang mahasiswa nasionalis fanatik, ketika ia membacakan pengumuman dan keputusan Kerajaan untuk perang terhadap poros dalam Perang Dunia II, pada tanggal 24 Februari 1944.<sup>157</sup> *Kedua*, Mahmud Nokrasi. Ia dibunuh oleh mahasiswa anggota Persatuan di gedung Kementerian Dalam Negeri, pada tanggal 28 Desember 1948<sup>158</sup>. Dan *ketiga*, Anwar Syadat. Ia dibunuh oleh tentara fundamentalis pada tahun 1981<sup>159</sup>. Poin pertama dan kedua terjadi sebelum Mesir menjadi republik, sedangkan yang ketiga terjadi setelah Mesir menjadi republik.

Adapun kepala pemerintahan Mesir yang diturunkan paksa dengan cara mengundurkan diri, terkhusus pasca Mesir menjadi negara republik, antara lain: pertama, Mohammad Najib (presiden pertama Mesir). Ia diturunkan paksa oleh Gamal Abdul Nasser pada tahun 1953, dalam tiga tahap berturut-turut. Tahap

<sup>157</sup> Ibid. Hlm 308. Baca juga Husaini, I. M. (1983). *Ikhwanul Muslimun, Tinjauan Sejarah Sebuah Gerakan Islam (Bawah Tanah)*. Jakarta: Grafiti Pers, Hlm. 22

<sup>158</sup> Ibid, Hlm 310. Husaini, I. M. (1983). *Ikhwanul Muslimun, Tinjauan Sejarah Sebuah Gerakan Islam (Bawah Tanah)*. Jakarta: Grafiti Pers, Hlm 27.

<sup>159</sup> *Pembunuhan Presiden Mesir Anwar Sadat. Dia pelopori perjanjian damai antara Mesir dengan Israel*. VivaNews.Com. diakses tanggal 15 Juli 2014  
<http://dunia.news.viva.co.id/news/read/357030-06-10-1981--pembunuhan-presiden-mesir-anwar-sadat>

pertama (25 Februari- 8 Maret), RCC mencabut semua jabatan Najib, namun diprotes oleh para pendukung Najib, dan tahap pertama pun gagal. Tahap kedua (18 April-31 Mei), Nasser menggantikan Najib sebagai perdanamenteri dan ketua RCC, dan membiarkan Najib menjadi presiden republik. Tahap ketiga (4 November), RCC memecat Najib, menuduhnya berkomplotan dengan musuh revolusi, dan mengenakan tahanan rumah.<sup>160</sup>

Kedua, M Husni Mubarrak. Husni Mubarrak diturunkan paksa oleh masyarakat Mesir pada tahun 2011, setelah ia menjabat sebagai presiden Mesir lebih dari 30 tahun (1981-2011). Dan ketiga, Muhammad Mursi. Ia diturunkan paksa oleh oposisi pemerintahan yang dibantu oleh militer pada tahun 2013, setahun setelah ia dilantik sebagai presiden Mesir, sekaligus menyandang presiden Mesir pertama dari sipil dan dipilih secara demokratis.

Dari ketiga contoh mengenai penurunan paksa dengan cara pengunduran diri dari kepala negara, dipilah kembali kepada dua bentuk penurunan paksa. Yaitu, penurunan paksa dengan cara pengunduran diri kepala negara yang memang menjadi perdebatan internal, atau tidak percaya akan kepala pemerintahan dan perselisihan elit politik; dan penurunan paksa dengan cara pengunduran diri yang merupakan dampak dari geliat gerakan rakyat menggugat kepemimpinan nasional Arab. Peristiwa tersebut dikenal sebagai kebangkitan Dunia Arab atau Musim Semi Arab, *Arab Spring*.

---

<sup>160</sup> Lenczowski, G. (1993). Op.cit, Hlm 318-319

Arab Spring atau kebangkitan Dunia Arab dalam bahasa arab adalah ath-Thawrat al-'Arabiyyah, yang jika diartikan kembali secara harfiah adalah pemberontakan Arab. Ada beberapa pengertian mengenai Arab Spring: Pertama, Arab Spring adalah gelombang revolusi unjuk rasa dan protes yang terjadi di Dunia Arab, dengan mendengungkan slogan *Ash-Sha'b yurid isqat an-nizam* (Rakyat ingin menumbangkan rezim ini).<sup>161</sup> Kedua, Arab Spring adalah sebutan untuk semangat reformasi dan gelombang revolusi yang terjadi di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara.<sup>162</sup> Dan ketiga, Arab Spring merupakan sebuah fenomena merebaknya revolusi demokrasi di Dunia Arab.<sup>163</sup> Namun, dari ketiga pengertian tersebut, secara eksplisit maupun implisit dapat kita ketahui bahwasanya Arab Spring adalah sebuah gerakan atau gelombang baik itu reformasi dan revolusi yang terjadi di kawasan Timur Tengah atau Afrika Utara ditinjau wilayah atau Dunia Arab (Bangsa Arab) ditinjau kesukuan, yang dilakukan oleh masyarakat untuk suatu perbaikan, dan yang dimaksud dengan semi pada Arab Spring adalah demokratisasi.

Demokratisasi ialah sebuah proses atau upaya suatu bangsa untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi dalam suatu negara. Demokratisasi adalah suatu perubahan baik itu perlahan maupun secara cepat kearah demokrasi. Demokratisasi ini menjadi tuntutan global yang tidak bisa dihentikan. Demokrasi sendiri menurut dari bahasanya ialah pemerintahan oleh rakyat. Banyak yang

---

<sup>161</sup> Jatmika, S. (2012, Oktober). The Arab Spring 2010: Puncak Gunung Es Krisis Politik di Kawasan Timur Tengah. *Jurnal Hubungan Internasional*, 302.

<sup>162</sup> *Konflik Suriah dan Harga Minyak Dunia*. (2013). Jakarta: Manupif Asset Management.

<sup>163</sup> Afrizal, S. M. (2013). DAMPAK FENOMENA ARAB SPRING TERHADAP PEMERINTAHAN LEBANON 2011-2013. *Jurnal Bagus Novandi*, 5.

mengatakan konsep demokrasi ialah sebuah konsep pemerintahan yang dibangun oleh rakyat, untuk rakyat. Demokrasi juga diartikan sebagai simbol kedaulatan rakyat. Pemimpin yang dipilih secara demokratis, ia tidak bertanggung jawab untuk melaksanakan cita-cita dan gagasan rakyat pemilihnya itu. Sebaliknya, ia justru bertanggung jawab untuk membimbing rakyat sesuai dengan aturan-aturan hukum dan pendapat Imam.<sup>164</sup>

Timbulnya gerakan demokratisasi pada Dunia Arab yang kemudian menjadi isu sentral Dunia Arab, dikarenakan mayoritas negara-negara Arab di Timur Tengah dan Afrika Utara masih berada di bawah baying-bayan otoritarianisme atau semi-otoritarianisme. Karakter dari otoritarian adalah mengekang kebebasan individu. Sementara isu kebebasan individu merupakan isu utama yang dibawa oleh gerakan demokrasi. Dan demokrasi memiliki kaitan erat dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Sebuah negara yang ngatakan diri sebagai negara demokrasi harus menghormati HAM.<sup>165</sup>

Dalam gelombang revolusi maupun reformasi, para unjuk rasa dan protes menggunakan teknik pemberontakan sipil dalam kampanye yang melibatkan serangan, demonstrasi, pawai dan pemanfaatan media sosial, seperti: Facebook, Twitter, You tube, dan Skype, untuk mengorganisir, berkomunikasi, dan meningkatkan kesadaran terhadap usaha-usaha penekanan dan penyensoran internet oleh pemerintah.<sup>166</sup>

---

<sup>164</sup> Riza, Sihbudi. 2007. *Menyandera Timur Tengah*. Mizan Publika: Jakarta Selatan. Hal 76.

<sup>165</sup> *Ibid*, Hlm 79

<sup>166</sup> Jatmika, S. (2012, Oktober). *Op.cit* Hlm 307

Istilah lain yang digunakan untuk mencerminkan apa yang terjadi pada Dunia Arab selain Arab Spring adalah Revolusi Melati. Revolusi Melati sendiri adalah suatu istilah yang diberikan oleh orang-orang Arab untuk mengidentikan pergolakan rakyat di negar-negara Arab bagaikan bunga melati yang sedang mekar. Bunga melati merupakan jenis tumbuhan bunga yang menarik untuk dipandang, harum, dan simbol dari ekspresi kesucian dan ketulusan kasih sayang. Negara-negara yang bergejolak tersebut diibaratkan merupakan setangkai bungan melati yang berada di Afrika dan Timur Tengah. Yang kemudian, satu persatu kuncup bunga tersebut mulai mengeluarkan baunya yang harum yaitu peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu revolusi.<sup>167</sup>

Rangkain Arab Spring atau Revolusi Melati ini berawal dari revolusi yang terjadi di Tunisia. Revolusi Tunisia terpicu atas ulah yang dilakukan oleh salah satu rakyatnya, yaitu Mohammed Baozizi yang berusaha untuk membakar diri sebagai bentuk ekspresi keputus-asaan yang tidak menemukan jalan keluar atas kondisi ekonomi yang dihadapinya, ditambah atas perlakuan kasar dari pihak keamanan negaranya berupa perlakuan pembakaran terhadap lapak jualanannya.<sup>168</sup>

Dan semenjak aksi bakar diri tersebut, terjadi aksi demonstrasi yang menuntut penguduran diri Presiden Tunisia, yaitu Zein Al-Abidin Ben Ali; aksi tersebut dilakukan oleh rakyat Tunisia sebagai ekspresi tidak percaya, bosan, dan jenuh terhadap kondisi negaranya. Dimana rakyat menilai bahwasanya korupsi

---

<sup>167</sup> Apriadi Tamburaka. 2011. *Revolusi Timur-Tengah*. PT Buku Seru: Jakarta. Hlm 34

<sup>168</sup> Ibid, Hlm 37

pemerintah telah menodai nilai perjuangan rakyat untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Imbasnya adalah pengangguran merata dan tingginya biaya hidup turut mengobarkan rakyat Tunisia untuk bangkit dari keterpurukan akibat tidak adanya perhatian dari pemerintahan yang berkuasa. Setelah beberapa hari melakukan aksi demonstrasi, pada tanggal 14 Februari 2011, Ben Ali selaku Presiden Tunisia mengundurkan diri.<sup>169</sup>

Keberhasilan Revolusi Tunisia dimana rakyat Tunisia berhasil menurunkan paksa Ben Ali yang telah lama berkuasa tersebut menjadi inspirasi yang menjalar ke kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, yang memiliki beberapa kesamaan. Yaitu: pemerintahan diktator yang telah berkuasa terlalu lama, mayoritas negara-negara tersebut memiliki sumber daya alam minyak bumi yang dikuasai oleh segelintir penduduk, dan korupsi yang mengakar.

Selanjutnya, setelah Revolusi Tunisia disambut langsung atas revolusi-revolusi yang timbul disetiap negara-negara Arab, antara lain: Mesir, Yordania, Libya, Al-Jazair, Yaman, dan yang sampai sekarang masih berlangsung adalah Suriah.<sup>170</sup> Pada tanggal 11 Februari 2011, Husni Mubarrak mengundurkan diri sebagai Presiden Mesir, setelah 18 hari protes masal dan mengakhiri kepemimpinannya selama 30 tahun. Pada bulan yang sama, Februari 2011, Perdana Menteri Yordania diturunkan paksa oleh rakyat Yordania. Hal ini terjadi karena banyak rakyat Yordania menyalahkan pemerintahnya bertanggung jawab

---

<sup>169</sup> Ibid., Hlm 39

<sup>170</sup> Nainggolan, P. P. (2013). KEGAGALAN TRANSISI DEMOKRATIS DAN MASA DEPAN MESIR. *Info Singkat, Hubungan Internasional*, 2.



atas resesi panjang dan meningkatnya hutang publik yang menyentuh rekor 15 miliar dolar AS.<sup>171</sup> Dan gelombang revolusi silih berganti di tanah bangsa Arab tersebut.

Dari sekian negara-negara Arab yang terkena dampak dari Arab Spring, terdapat beberapa kepala pemerintahan dari negara-negara Arab tersebut yang menolak mengundurkan diri, antara lain adalah kasus penurunan paksa Muammar Khadafi sebagai Presiden Libya, yang mengakibatkan terjadinya perang saudara antara masyarakat Libya, namun akhir dari perang saudara tersebut adalah terbunuhnya Muammar Khadafi di tangan para pemberontak Libya pada bulan oktober 2011 di tanah kelahirannya.<sup>172</sup>

#### B. Konstelasi Sosial Politik Dalam Penurunan Paksa Mursi

Pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2013, Presiden Mesir yang dipilih secara demokratis dan Presiden sipil pertama dalam sejarah Mesir, Muhammad Mursi secara sepihak resmi diberhentikan dari jabatannya oleh Menteri Pertahanan Mesir, Jendral Abbas As-Sisi, setelah ia memberikan ultimatum 48 jam kepada Mursi untuk dapat menyelesaikan demonstrasi dan tuntutan di Mesir.<sup>173</sup> Pemberhentian secara sepihak atau penurunan paksa yang dilakukan oleh Jendral Abbas As-Sisi terhadap Muhammad Mursi sebagai Presiden Mesir, merupakan penurunan paksa yang kedua atau sering disebut juga dengan Revolusi Mesir Jilid II dalam fenomena Arab Spring.

<sup>171</sup> <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/internasional/11/02/01/161931-raja-yordania-ganti-perdana-menteri>, Diakses hari Senin, 14 Juli 2014.

<sup>172</sup> <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/11/10/20/ltdbe0-warga-libya-rayakan-kematian-qaddafi>, Diakses hari Senin, 14 Juli 2014.

<sup>173</sup> Nainggolan, P. P. (2013). Op.cit, Hlm 5

Hal demikian karena dua tahun sebelumnya, tepatnya pada tanggal 25 Januari 2011 terjadi Revolusi Mesir dan berakhir pada tanggal 11 Februari 2011 dengan pengunduran diri Presiden Mesir Husni Mubarrak sebagai Presiden Mesir, setelah 18 hari protes massal dan mengakhiri kepemimpinannya selama 30 tahun. Revolusi Mesir dengan menurunkan paksa presiden Husni Mubarrak yang telah berkuasa di Mesir selama 30 tahun tersebut merupakan efek domino apa yang dikenal dengan fenomena Arab Spring. Yang mana fenomena ini terjadi pertama kali di Tunisia dengan berakhirnya masa kekuasaan Zein Al-Abidin Ben Ali melalui gerakan Revolusi Tunisia oleh rakyat Tunisia yang geram atas tingkah presidennya.<sup>174</sup>

Penurunan paksa Husni Mubarrak sebagai presiden Mesir merupakan tindakan imitasi dan oportunitis dari apa yang terjadi pada Revolusi Tunisia. Keberhasilan rakyat Tunisia dalam menumbangkan rezim Ben Ali, menjadi pemicu semangat rakyat Mesir untuk melakukan tindakan yang sama atas realita dan perasaan yang sama. Yaitu pemerintahan yang otoritarian, korupsi, dan lebih mementingkan kepentingan pribadi ketimbang kepentingan rakyat Mesir.

Dengan melihat momentum keberhasilan Revolusi Tunisia tersebut, semangat rakyat Mesir mulai terpacu untuk melakukan hal yang sama terhadap negaranya, yaitu tuntutan revolusi. Tuntutan Revolusi Mesir pun terlaksana pada tanggal 25 Januari- 11 Februari 2013 melalui gerakan massa rakyat Mesir. Gerakan massa adalah kekuatan dan naluri apa yang telah menarik keluar, ibarat besi-berani raksasa, dari seluruh pelosok kota, puluhan, ratusan, ribuan manusia dari berbagai

---

<sup>174</sup> Ibid, Hlm 6

latarbelakang, pendidikan, pekerjaan, jenis kelamin, usia yang kebanyakan tidak mengenal satu sama lain, lalu menyeretnya ke dalam satu gerombolan, mengikatnya, dan mengaduknya menjadi satu makhluk raksasa bersatu semangat, bersatu jiwa, bersatu suara, bersatu gerak berbondong-bondong mengikuti gerak-gerak dan pekikan, dengan kepalanya didepan.<sup>175</sup>

#### 4. Kemenangan Mursi sebagai Presiden Mesir

Setelah terjadinya revolusi pada tanggal 25 Januari 2011 hingga berakhirnya revolusi yang ditandai dengan turun paksanya Husni Mubarrak sebagai presiden Mesir pada tanggal 11 Februari 2011, masyarakat Mesir mulai berbenah diri. Rakyat Mesir perlahan-lahan mulai memulihkan konstruksi negara yang carut marut disebabkan revolusi tersebut. Mesir sedang menuju tatanan baru yang dibangun berlandaskan kesadaran politik yang bergulir indah dalam rahim revolusi. Rakyat Mesir mulai menyadari tanggung jawabnya sebagai pemegang kedaulatan tertinggi yang menentukan kemanakah negara ini mengarah.

Setelah Husni Mubarrak mengundurkan diri sebagai presiden Mesir pada tanggal 11 Februari 2011, tampuk kekuasaan sementara diamanahkan kepada suatu lembaga tinggi Mesir, yaitu Majelis Tinggi Militer. Majelis Tinggi Militer Mesir ini bertugas sebagai fasilitator guna terlaksananya tuntutan Revolusi Mesir, hingga terpilihnya presiden baru pengganti Husni Mubarrak. Pada tanggal 16 Februari 2011 Majelis Tinggi Militer membentuk Komite Perubahan Konstitusi yang diketuai Tariq Al-Bisyri beranggotakan 3 Hakim Mahkamah Konstitusi

---

<sup>175</sup> Hoffer, E. (1993). *Gerakan Massa*. Jakarta: Obor Indonesia. Hlm 3

Tinggi dan 3 Guru Besar Ilmu Hukum dan Tata Negara Mesir, yang merupakan salah satu tuntutan Revolusi Mesir.<sup>176</sup>

Tugas dari komite tersebut adalah merubah dan mengganti konstitusi Mesir pada tahun 1971, akan tetapi dalam pandangan Tariq sebagai ketua dari komite ini, menyatakan bahwasanya kelompok kecil ini tidak mungkin mengubah dan mengganti konstitusi Mesir secara menyeluruh, karena disamping waktu yang tidak memungkinkan, adanya tuntutan untuk menegerakan pemilihan presiden Mesir, sebagai pengganti Husni Mubarrak. Oleh sebab itu, komite tersebut hanya mengubah dan mengganti 9 pasal saja: 75,76, 77, 88, 93, 193, 198, 179 dan 189.<sup>177</sup> Dimana secara substansialnya memuat perubahan mekanisme peralihan konstitusi dari militer ke sipil, pelaksanaan pemilu parlemen, dan pemilu presiden.

Pelaksanaan komite yang tak menyelesaikan seluruh pergantian dan perubahan konstitusi Mesir, melahirkan dua kubu politik. *Pertama*, yaitu SCAF dan Ikhwanul Muslimin, dimana kedua organisasi ini menyepakati untuk tidak menyelesaikan seluruh pergantian dan perubahan konstitusi Mesir. Karena disamping alasan SCAF diatas, Ikhwanul Muslimin menambahkan, bahwasanya untuk perubahan dan pergantian konstitusi harus melibatkan seluruh elemen masyarakat Mesir, tidak hanya SCAF.<sup>178</sup>

---

<sup>176</sup> Kerckhove, F. d. (2012). Egypt's Muslim Brotherhood and the Arab Spring. *CDFAI Canadian Defence & Foreign Affairs Institute*, 3.

<sup>177</sup> Ibid, Hlm 6

<sup>178</sup> Ibid, Hlm 7

*Kedua*, yaitu Muhammad Baradei yang mengetuai beberapa organisasi yang tergabung dalam aliansi, meminta SCAF dapat menyelesaikan keseluruhan penggantian dan perubahan konstitusi Mesir, tanpa harus melibatkan yang lain. Karena ia beranggapan, jika penggantian dan perubahan konstitusi itu tidak menyeluruh oleh SCAF, takutnya konstitusi Mesir akan diintervensi oleh presiden terpilih melalui manuver-manuver yang menguntungkan salah satu pihak.

Setelah komite yang dipilih menyelesaikan tugasnya, SCAF mengumumkan undang-undang pemilu dan menunda pemilihan parlemen hingga November 2011. Dengan adanya pengumuman tersebut, suasana politik Mesir mulai terasa, manuver-manuver politik mulai kelihatan, dan perbincangan politik mulai digalakkan. Pemilihan umum ini terasa berbeda dari sebelumnya karena lahir dari rahim revolusi rakyat Mesir, yang mulai bangkit dari keterpurukan, dan jauh dari tindakan intimidasi serta tekanan.

Partisipasi politik pun mulai muncul, beberapa masyarakat Mesir sibuk mempersiapkan pemilihan umum tersebut. Dan partai politik pun mulai menampakkan diri mereka. Dalam memeriahkan pesta demokrasi melalui instrument pemilihan umum, setidaknya ada beberapa partai yang ikut dalam kontes pemilihan umum tersebut. Yaitu: FJP, Al-Nour, New Wafd, Kotla Misria, Wasat, Ishlah wa Taghyir, Wathani Demokrati, Tsaurah Mustamirrah, Konservatif, Salam Demokrasi, Adalah, Hurriyah dan Nasari. Dari dari beberapa partai tersebut, jika dipilah sesuai dengan ideology partai, maka dapat dibagi dengan enam ideologi. Yaitu: Islamis (FJP), Islamis Salafis (Al-Nour), Islamis

Modern (Wasat), Liberal (New Wafd, Kotla Misria, Ishlah wa Taghyir, dan Salam Demokrasi), NDP (Hurriya, Wathani Demokrati, Konservatif, dan Nasari), dan Kiri (Tsaurah Mustamirrah).<sup>179</sup>

Dalam pelaksanaan pemilihan umum yang pertama kali diselenggarakan langsung di bawah kewenangan lembaga yudikatif Mesir, dan pemilihan pun digelar dalam 3 putaran. Tiap putaran digelar di 9 propinsi secara berlajut sepekan usai pengumuman pemenang satu putaran, dan dilanjutkan kepada putaran berikutnya<sup>180</sup>. Hal ini dilakukan, karena jumlah TPS tidak berbanding lurus dengan jumlah hakim, jumlah TPS keseluruhan adalah 50.000 dengan jumlah hak pilih keseluruhan 50.000.000 jiwa. Dengan 3 putaran ini, cukup mengurus tenaga panitia dari pemilihan umum.

Putaran pertama, pada tanggal 28 November 2011 dan pemilu ulang putaran pertama pada tanggal 5 Desember 2011, dengan raihan 3 partai teratas adalah FJP dengan raihan 36.6%, Al-Nour dengan raihan 24.4%, dan Kotla misria dengan raihan 13.4%. pada putaran kedua, pada tanggal 14 Desember 2011 dan pemilu ulang putaran kedua pada tanggal 21 Desember 2011, dengan raihan 3 partai teratas adalah FJP dengan raihan 36.3%, Al-Nour dengan raihan 28.8%, dan New Wafd dengan raihan 9.6%. Dan putaran ketiga, pada tanggal 3 Januari 2012 dan pemilihan ulang pada tanggal 10 Januari 2012, dengan raihan suara 3 partai

---

<sup>179</sup> Taryudi. (2012). Saat Aktivis Islam Memimpin Negerinya : Dinamika Menuju Dominasi. *FRONTIER, Kajian Strategis Hubungan Luar Negeri*, 7.

<sup>180</sup> *Ibid*, Him 7

teratas adalah FJP dengan raihan 37 kursi, Al-Nour dengan raihan 29 kursi, dan New Wafd dengan raihan 13 kursi.<sup>181</sup>

Dari hasil pemilihan umum melalui 3 putaran diatas, posisi pertama dengan jumlah terbanyak, secara konsisten diraih oleh FJP, yaitu 36.6% pada putaran pertama, 36.3 % pada putaran kedua, dan 37 kursi pada putaran ketiga; menjadikan FJP sebagai peserta pemilu yang memiliki kesempatan besar untuk memberikan perwakilan mereka dalam pemilihan umum presiden Mesir nantinya. Raihan yang begitu besar didapatkan oleh FJP, pada dasarnya sudah diketahui melalui survei-survei dari beberapa lembaga survey Mesir, dimana FJP sebagai sayap partai dari Ikhwanul Muslimin meraih prosentase yang cukup tinggi, mendekati 39-40%. FJP sebagai sayap partai dari Ikhwanul Muslimin, sangat terbantu atas solidaritas dan keeratan dari anggota Ikhwan itu sendiri, disamping memang secara kelembagaan Ikhwanul Muslimin hanya memiliki satu sayap politik, berbeda dengan Islamis salafis, yang memiliki tiga sayap politik.

Akan tetapi, meskipun raihan FJP mencapai 37 %, ditambah dengan 222 kursi di Majelis Rakyat, tidak dapat serta merta FJP dapat memenangkan pemilihan umum presiden Mesir, oleh sebab itu FJP masih membutuhkan bantuan dari partai lain, guna memuluskan raihan presiden Mesir. Untuk menjawab permasalahan ini, FJP mulai berusaha merangkul Partai Al-Nour, yang raihannya

---

<sup>181</sup> Ibid, Hlm 12

secara kumulatif dari 3 putaran tersebut, satu tingkat di bawah dari FJP. Dan hasilnya pun mengembirakan, dengan berkolisinya FJP dengan Partai Al-Nour.<sup>182</sup>

Dengan berkoalisinya FJP dan Al-Nour, menjadikan koalisi ini sangat berkemungkinan besar menang dalam pemilu. Karena, selain organisasi Ikhwanul Muslimin dengan FJP sebagai sayap politiknya, kelompok ad-da'wa al-salafiyya, kelompok salafis Mesir yang dalam pemilu Mesir diwakili oleh partai Al-Nour, merupakan kelompok yang sangat besar di Mesir. Kemenangan FJP dan Al-Nour sangat besar.

Pada konstestasi pemilihan presiden, mulai muncul beberapa nama yang kiranya berpotensi maju sebagai calon presiden Mesir.<sup>183</sup> Nama-nama tersebut adalah pertama, Amr Mousa. Ia merupakan orang lama dalam perpolitikan Mesir, bahkan ia pernah digadang-gadang menjadi bakal Calon Presiden Mesir oleh masyarakat Mesir. Karir yang sangat menojol dari Mousa adalah ia pernah menjabat Duta Besar Mesir untuk India, Duta tetap Mesir untuk PBB New York, dan Menteri Luar Negeri Mesir, ditambah ia pernah meraih nobel Dua Nil.

Kedua, dr Abdel Moneim Abdoul Fatouh. Ia adalah seorang relawan kemanusiaan Mesir, dan namanya mulai mencuat ditengah public ketika ia mendeklarasikan diri sebagai calon presiden Mesir pada saat Revolusi Mesir 2011. Ketiga, Hazem Salah Abu Ismail. Ia pernah tergabung dalam asosiasi pengacara Mesir, di bawah kontrol Ikhwanul Muslimin. Namanya mulai dikenal masyarakat karena pada tahun 1995 dan 2005 ia pernah menjadi perwakilan

---

<sup>182</sup> Ibid, Hlm 15

<sup>183</sup> Ibid, Hlm 23



Ikhwanul Muslimin di Majelis Rakyat untuk Dapil Dokka. Keempat, Nabil Arabi. Ia adalah tokoh yang hampir kurang lebih sama dengan Mousa, karena kerirnya kurang lebih sama. Ia Juga pernah menjabat seperti Mousa, antara lain: Sekjend Liga Arab dan Mentri Luar Negeri Mesir.

Kelima, Hamden Shabahi. Ia adalah tokoh Mesir, satu dari beberapa kandidat yang diusung oleh parati, yaitu: *Dignity Partai (Hizbul Al-Karomah)*. Dari kelima nama tersebut nantinya hanya beberapa nama saja yang ikut mencalonkan diri sebagai presiden Mesir, ditambah dengan nama yang tidak tercantum dalam lima nama yang diindikasikan mencalon sebagai presiden Mesir, yaitu: Ahmad Syafiq dan Muhammad Mursi. Ahmad Syafiq adalah incumbent, sedangkan Muhammad Mursi adalah perwakilan resmi dari Ikhwanul Muslimin.

Semula, Ikhwanul Muslimin meletakkan Mursi sebagai nama cadangan untuk dicalonkan menjadi presiden Mesir. Nama inti yang dicalonkan oleh Ikhwanul Muslimin melalui sayap politiknya FJP adalah Khairat el-Shater, akan tetapi ketika namanya diajukan ke KPU Mesir, secara sepihak KPU Mesir mendiskualifikasi Shalter dari pencalonan dirinya sebagai presiden Mesir. KPU berdalih bahwasanya pendiskualifikasian dilakukan kepada Shalter, dikarenakan setatus Shalter masih sebagai tahanan politik era Husni Mubarrak.<sup>184</sup>

Dalam pemilihan Presiden Mesir putaran pertama tanggal 23-24 Mei 2011, yang diikuti oleh 5 calon presiden, yaitu: Muhammad Mursi, Ahmad Syafiq, Hamden Shabahi, Amr Mousa, dan dr Abdel Moneim Abdoul Fatouh. Dengan

---

<sup>184</sup> <http://www.al-ikhwan.net/kisah-ikhwanul-muslimin-ii-sabotase/> diakses tanggal 15 Juli 2014

setelah ultimatum 48 jam tersebut, Muhammad Mursi secara sepihak diberhentikan dari jabatannya sebagai presiden Mesir oleh Jendral As-Sisi.

Turun pakusnya Mursi sebagai presiden Mesir menuai pro dan kontra dimata masyarakat internasional, pasalnya Mursi merupakan presiden yang dipilih secara demokratis, namun bagaimana bisa ia digulingkan atau diturun paksa oleh Jendral As-Sisi yang kemudian menyatakan sebagai kehendak masyarakat Mesir. Ada dua faktor Yang melatarbelakangi penurunan paksa Muhammad Mursi sebagai presiden Mesir, yang secara legalitas terpenuhi karena dipilih oleh masyarakat Mesir melalui mekanisme pemilihan yang demokratis. Pertama, faktor internal. Yaitu faktor yang melatarbelakangi penurunan paksa Mursi dilihat Mursi sebagai personal dan pemerintahannya. Kedua, faktor eksternal. Yaitu faktor yang melatarbelakangi penurunan paksa Mursi, diluar dari intensitas personal Mursi dan pemerintahan.

a. Faktor internal

- o Identitas Mursi sebagai kader dan presiden dari Ikhwanul Muslimin

Secara personalia, Mursi memiliki integritas dan kapasitas yang sangat mumpuni, Mursi pernah mendapat penghargaan sebagai anggota parlemen Mesir terbaik pada tahun 2005, dan secara kinerja ia sangat proposional. Keproposionalannya dapat dilihat dari bangunan kabinetnya, yang semuanya diisi oleh orang yang berpengalaman, meskipun dapat menjadi parasit di dalam pemerintahannya. Akan tetapi, personal Mursi tidak serta merta menjadi legitimasi sosial untuk dengan lances menjabat sebagai presiden Mesir. Latar belakang dari Mursi menjadi tolak ukur dari legitimasi sosial tersebut.

Muhammad Mursi adalah presiden yang secara jelas diusung dan bagian dari Ikhwanul Muslimin melalui sayap politiknya FJP. Sejarah Ikhwanul Muslimin di Mesir cukup panjang, pasang surutnya dapat dengan mudah kita lacak diberbagai media informasi, baik cetak maupun online. Ikhwanul Muslimin dikenal dengan gerakan Islam garis keras, yang menginginkan terciptanya syari'at Islam dan Pan-islamisme. Dengan setatusnya sebagai kaum Islamis yang kuat dan dengan melihat kesejarahannya, membuat para kompetitornya, terkhusus pada ideologi, menjadi takut jika nantinya Mesir akan dijadikan negara agama Islam.

Terdapat traumatik yang tak mendasar dari kelompok yang tidak senang jika Mursi menjabat presiden Mesir hingga selesai, yang kemudian membuat kelompok tersebut terus bermanuever untuk berbagai cara apa pun menggulingkan Mursi dari jabatannya. Ketakutan jika nanti undang-undang Mesir diganti dengan saduran nilai-nilai syari'at Islam, yang memang sebelumnya SCAF melalui Komitennya tidak menyelesaikan refrendum dan amandemen konstitusi Mesir tahun 1971, selalu merasuki alam bawah sadar dari setiap kelompok yang tidak senang kepada Mursi.

- o Pecahnya koalisi pemerintahan Mursi

Naiknya Mursi sebagai presiden Mesir merupakan hasil dari koalisi besar antara Ikhwanul Muslimin dengan sayap politiknya FJP (37%) dan Al-Da'wa Al-Salafiyya, kelompok salafis Mesir dengan sayap politiknya Al-Nour Party (25%). Namun, dalam perjalannya pemerintahan Mursi koalisi besar ini pecah setelah pada tanggal 17 Februari 2013 Mursi secara sepihak memecat Dr Kholid 'Alim Al-Dien, seorang anggota dan penasehat salafis dalam urusan lingkungan

al-Nour. Pemecatan ini terjadi, karena Kholid diindikasikan melakukan pemanfaatan terhadap posisinya untuk mempromosikan kepentingan pribadi dan telah terlibat dalam korupsi. Pemberhentiannya Kholid diikuti dengan pengunduran diri penasehat salafi lainnya, yaitu Bassem Al-Zarka.<sup>188</sup>

Pemberhentian sepihak yang dilakukan oleh Mursi menuai kritikan dari internal partai Al-Nour. Sheikh Yasser al-Burhami, wakil-kepala Al-Dakwah Al-Salafiyyah, mengklaim bahwa Morsi telah melanggar pemahaman pra-pemilu yang Al-Nour akan menjadi mitra utamanya dalam pemerintahan. Dan ia pun menambahkan, bahwasanya Mursi dan kroni-kroninya telah melakukan nepotisme dengan menunjuk sekitar 13.000 anggota Ikhwanul Muslimin untuk posisi kunci di seluruh Mesir, khususnya di Kementerian Pendidikan dan Wakf (lembaga amal Islam). Kritikan Burhami pun diakhiri dengan mengancam akan melakukan pengkudetaan kedua terhadap Mursi.<sup>189</sup>

Setelah pecahnya koalisi pemerintah, partai Al-Nour bergabung dengan partai-partai oposisi, dengan bergabungnya partai Al-Nour dengan partai-partai oposisi, menjadikan prosentasi antara pemerintahan dan oposisi tidak seimbang, dengan beralihnya Al-Nour yang memiliki suara 25% dalam pemilihan umum parlemen, mengakibatkan FJP yang hanya memiliki suara 37% dalam pemilihan umum parlemen, terdesak dan tersudutkan.

---

<sup>188</sup> Barak, M. (2013). The Salafist Al-Nour Party and the Muslim Brotherhood: The End of the Affair? *Telaviv Note*, Hlm 4.

<sup>189</sup> Ibid, Hlm 7

b. Faktor eksternal

o Oposisi pemerintahan Mursi

Oposisi dari pemerintahan Mursi pada dasarnya merupakan kumpulan sebagian besar kompetitor Mursi yang kalah dalam pemilihan umum presiden Mesir, mereka antara lain: Amr Mousa, Hamdan Shabahi, dan Al-Baradei; dan beberapa kelompok Islam Moderat, kelompok minoritas Kristen Katolik dan Koptik, serta gabungan kelompok sekular dari agama-agama tersebut. Kegiatan oposisi dalam meng-couter dan mengkritisi kebijakan serta fenomena yang terjadi selama pemerintahan Mursi begitu massif, hampir semua isu yang bertentangan dengan oposisi melahirkan demonstrasi-demonstrasi di Mesir.<sup>190</sup>

Motivasi sesungguhnya pemberontakan dari sikap meng-couter dan mengkritisi setiap kebijakan Mursi disenyalir merupakan tindakan politis dari para kompetitor yang kalah dalam pemilihan umum presiden, dan akumulasi dari semua kemarahan, dendam, serta kekesalan oposisi bersama kroni-kroni Mubarak sehingga mereka serukan pemberontakan, "Jika kita ingin memenangkan revolusi 25 Januari, maka kita harus memberontak"; perseteruan ideology, dan kekhawatiran pada menguatnya poros Islam.<sup>191</sup>

Adapun dalam perseteruan ideologi dengan kekhawatiran pada penguatan poros Islam, merupakan dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Semenjak naiknya Mursi sebagai presiden Mesir, dimana ia merefresentasikan Ikhwanul

<sup>190</sup> <http://news.detik.com/read/2012/05/29/015658/1926911/10/mursi-dan-shafiq-melaju-ke-pilpres-mesir-putaran-kedua> diakses tanggal 15 Juli 2014

<sup>191</sup> Ibid.,

Muslimin dengan Islamisnya, membuat kompetitor ideologi Ikhwanul Muslimin takut jika Mesir nantinya akan dijadikan negara agama Islam, dengan menjalankan syariat Islam, serta mengganti undang-undang dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dengan ketakutan seperti ini, membuat para kontra syariat Islam berusaha untuk menjatuhkan Mursi dari jabatannya.

o Intervensi Asing

Revolusi Mesir jilid II atau penurunan paksa Mursi sebagai presiden Mesir yang dipilih secara demokratis disinyalir adanya intervensi dari pihak asing, non-Mesir; yang memiliki kepentingan terhadap Mesir. Ada beberapa nama Negara yang disinyalir mengintervensi penurunan paksa Mursi, antara lain: Amerika Serikat, Saudi Arabia, Qatar, dan Israel. Keempat negara ini sangat gencar dukungannya terhadap penurunan paksa Mursi, bahkan salah satu atau beberapa dari negara tersebut pertama kali memberikan ucapan selamat kepada rakyat Mesir atas turun paksanya Mursi sebagai presiden Mesir.<sup>192</sup>

Kepentingan keempat negara tersebut terhadap penurunan paksa Mursi, antara lain: negara Israel yang sangat berdekatan dengan Mesir, memiliki ketakutan jika Mursi menjadi presiden terlalu lama di Mesir, tidak akan membuat jaminan bahwasanya bahwa tentara Mesir tidak terlibat perang melawan tentara Israel. Karena melihat sejarah bagaimana Ikhwanul Muslimin begitu getol dalam perlawanan terhadap Israel dalam pembelaannya terhadap Palestina.

---

<sup>192</sup> Prof. Dr. Salim Said, *pertama kalinya terjadi koalisi besar mendukung kudeta Mesir*, Jakarta: Mi'raj News Agency (MINA)

Adapun pemerintahan Saudi Arabia dan Qatar, memiliki ketakutan, jika demokratisasi yang terjadi di Mesir berhasil akan menjalar dan memicu gerakan demokratisasi di negara-negara mereka, serta gelombang Arab Spring akan terus berlanjut, maka akan mengganggu stabilitas kekuasaan dan pemerintahannya atas negara-negara mereka. Oleh sebab itu, untuk mengurangi kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi, kedua Negara tersebut sangat mengharapkan pola demokratisasi yang terjadi di Mesir dapat digagalkan.

Sedangkan Amerika Serikat, dalam pidato Barack Obama disela-sela liburan di Massachussets, Presiden Obama mengecam keras penggunaan kekerasan terhadap pengunjuk rasa pro-Muhammad Mursi yang mengakibatkan sedikitnya 525 orang meninggal dunia. Meskipun ia menambahkan pemerintahannya tidak akan membekukan bantuan militer ke Mesir yang bernilai 1,3 miliar dolar per tahunnya.<sup>193</sup> Di lain pihak, anggota kongres AS terpecah terkait penghentian bantuan militer ke Mesir terkait kekerasan yang melanda negeri itu.

Kedua belah pihak ini merupakan politisi dan para petinggi Partai Demokrat, politisi Partai Demokrat yang menolak dan berkeinginan untuk menghentikan bantuan militer ke Mesir adalah Ellison, ia seorang politisi Muslim pertama yang terpilih untuk duduk di Kongres AS. Ia menegaskan, ""Saya akan memangkas bantuan namun tetap memelihara diplomasi intensif dengan Mesir

---

<sup>193</sup> Baca

<http://internasional.kompas.com/read/2013/08/15/2239099/Presiden.Barack.Obama.Kecam.Tragedi.Rabu.Berdarah.di.Mesir>, Diakses tanggal 15 Juli 2014

dan kawasan sambil mengatakan, kami akan mengucurkan kembali bantuan jika Anda menggentikan pertumpahan darah dan kembali ke jalur demokrasi,"<sup>194</sup>

o Isu-isu yang berkembang pada masa pemerintahan Mursi<sup>195</sup>

Setidaknya ada beberapa isu yang berkembang dalam pemerintahan Mursi di Mesir, antara lain:

1) Isu Ekonomi yang memburuk

Setahun setelah memerintah, kondisi perekonomian Mesir terus memburuk. Investasi asing tidak kunjung datang, sementara sektor pariwisata yang merupakan salahsatu tulang punggung ekonomi Mesir, tak kunjung pulih. Harga bahan makanan, bahan bakar dan komoditas lain terus meroket. Listrik seringkali mati karena ketiadaan bahan bakar.

2) Isu pelanggaran HAM dan demokrasi

Setahun kepemimpinan Mursi diwarnai banyak aksi pelanggaran Hak Asasi Manusia, demokrasi dan toleransi beragama. Dia dinilai gagal melakukan reformasi sektor keamanan terutama di kepolisian, paramiliter dan dinas intelijen Mesir. Ketika polisi Mesir terlibat pembantaian di Port Said, Januari 2013 lalu dan 30 orang meninggal, Mursi dinilai tidak berusaha menindak pelakunya dengan tegas. Serangan terhadap gereja Kristen Koptik dan kaum minoritas pun meningkat.

---

<sup>194</sup> Baca

<http://internasional.kompas.com/read/2013/08/19/1745484/Kongres.AS.Terpecah.Terkait.Penghentian.Bantuan.Militer.ke.Mesir...> Diakses tanggal 15 Juli 2014

<sup>195</sup> Baca <http://www.tempo.co/read/news/2013/07/04/115493383/Empat-Alasan-Presiden-Mesir-Digulingkan..> Diakses tanggal 15 Juli 2014



Selain itu, parlemen Mesir yang didominasi Ikhwanul Muslimin dinilai berusaha terus menerbitkan undang-undang baru yang membatasi masyarakat sipil. Sebuah Rancangan UU tentang keberadaan NGO sedang dibahas dan disebut-sebut bakal mengontrol organisasi masyarakat sipil.

3) Dekrit Presiden tanggal 22 November 2012 yang menyimpang

Keputusan Mursi menerbitkan sebuah dekrit presiden pada 22 November 2012 lalu dinilai sebagai sebuah kesalahan fatal. Dalam dekrit itu, Mursi memecat jaksa agung, membuat semua keputusan Sebulan setelah dekrit itu diterbitkan, pemerintahan Mursi menggelar referendum untuk mengesahkan konstitusi baru Mesir. Tindakan ini pun dikritik karena dinilai sepihak dan terburu-buru. Konstitusi itu dinilai hanya mencerminkan kepentingan kelompok Mursi dan tidak dibuat dengan mempertimbangkan elemen politik lain di Mesir.

ElBaradei, seorang penerima hadiah Nobel untuk perdamaian, sebelumnya menyebut dekrit itu menempatkan Presiden Mursi di atas hukum. Ia pun menambahkan dalam tulisannya di situs jejaring twitter, "Mursi hari ini merenggut semua kekuasaan negara dan menunjuk dirinya sendiri sebagai firaun baru Mesir. (Dekret ini) adalah pukulan telak terhadap jalannya revolusi yang bisa membawa konsekuensi gawat,"<sup>196</sup>

---

<sup>196</sup> Baca

<http://internasional.kompas.com/read/2012/11/23/10484366/Oposisi.Mesir.Tentang.Dekret.Presiden.Mursi>. Diakses tanggal 15 Juli 2014

Setelah resmi diturunkan paksa pada tanggal 3 Juli 2013 melalui pengumuman dan pembacaan surat keputusan resmi militer Mesir oleh Jendral As-Sisi, jabatan presiden interm (sementara) Mesir diberikan kepada Adli Mansour, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dan ditunjuk Hasem Al-Bablawi sebagai Perdana Menteri Mesir menggantikan Hisam Qandli.<sup>197</sup> Turun paksanya Presiden Mursi diikuti dengan dibekukannya konstitusi Mesir, kemudian akan diadakannya pemilihan umum yang dipimpin oleh pemerintahan sementara, serta penangkapan dan diberlakukannya larangan perjalanan bagi petinggi Ikhwanul Muslimin, penutupan sejumlah media Mesir, pembubaran Majelis Syuro.<sup>198</sup>

Penurunan paksa Mursi menuai pertentangan para pendukungnya, mereka pun mulai melakukan aksi protes atas tindakan anti-demokrasi yang telah dilakukan Militer Mesir terhadap Mursi. Aksi demonstrasi dari para pendukung Mursi pun mulai muncul di seluruh penjuru wilayah Mesir. Pada tanggal 4 Juli 2013, para pendukung Mursi melakukan aksi demonstrasi di dua tempat, yaitu Rabi'a Al-Adawiyah di wilayah Nasr City dan Nahda Squer di wilayah Giza; dalam aksi demonstrasi tersebut terjadi kekerasan yang dilakukan militer dengan mengakibatkan jatuhnya 36 korban tewas di pihak sipil.

Setidaknya ada 5 kejadian atau tragedi pembantaian yang terjadi pasca penurunan paksa Mursi, yang melibatkan para pendukung Mursi dan militer Mesir, yaitu: *pertama*, pembantaian Garda Republik. Pada hari senin 8 Juli 2011,

<sup>197</sup> Baca <http://www.tempo.co/read/news/2013/07/02/115492733/Militer-Mesir-Beri-Waktu-Mursi-48-Jam>, diakses tanggal 15 Juli 2014

<sup>198</sup> Baca <http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/13/09/23/mtl5ky-mesir-larang-semua-kegiatan-ikhwanul-muslimin>, diakses tanggal 15 Juli 2014

para pendukung Mursi melakukan aksi lanjutan di tempat yang sama sebelumnya yaitu Rabi'a Al-Adawiyah di wilayah Nasr City, mereka pun bermalam di Gedung Garda Republik, tidak jauh dari tempat aksi. Pada saat subuh tanggal 8 Juli 2013, ada 6 orang pengendar motor yang tidak dikenal dengan membawa senjata api melakukan tembakan yang mengarah kepada jamaah subuh, tepatnya pada rakaat kedua. Dalam insiden ini, terdapat 51 orang mati syahid dan 435 orang terkenaluka tembakan.<sup>199</sup>

*Kedua*, pembantaian missal Monumen Sadat. Pada tanggal 27 Juli 2013 di Monumen Sadat dekat Rab'ah Adawiyah, terjadi bentrokan antara kubu yang pro pengkudetaan dan yang kontra pengkudetaa, namun yang menjadi masalah disini adalah bagaimana para polisi, baik yang berseragam maupun berpakaian preman, beserta para sniper yang berada di atas gedung Al-Azhar, melakukan tembakan kepada para demonstran. Pada tragedi ini, terdapat 200 orang tewas dan 4500 orang yang terluka.<sup>200</sup>

*Ketiga*, pembantaian Rab'ah. Pada tanggal 14 Agustus 2013, para demonstrasi pendukung Mursi didatangi oleh para militer Mesir dan polisi Mesir baik yang beseragam maupun berpakaian preman. Kedatangan militer dan polisi ke tempat para demonstran guna membubarkan paksa para demonstroi damai tersebut, cara yang digunakan pun dengan cara kekerasan dan paksaan. Dalam situasi seperti ini, tembakan dan gas air mata menjadi santapan para demonstran. Penembakan yang membabi buta, ditambah dengan para sniper yang berjaga-jaga,

<sup>199</sup> Baca <http://www.suara-islam.com/read/index/8017/Tragedi-Pembantaian-Mesir--2.200-Tewas-Puluhan-Ribu-Luka-luka>, diakses tanggal 15 Juli 2014.

<sup>200</sup> Baca [http://article.wn.com/view/2013/08/20/KNKDM\\_Mengutuk\\_Pembantaian\\_Rakyat\\_Mesir/](http://article.wn.com/view/2013/08/20/KNKDM_Mengutuk_Pembantaian_Rakyat_Mesir/), diakses tanggal 15 Juli 2014

menambah ricuhnya situasi pada saat itu. Pada tragedi ini, terdapat lebih dari 2000 orang tewas dan lebih dari puluhan ribu orang terluka.<sup>201</sup>

*Keempat*, pembantaian Ramsis. Pada tanggal 16 Agustus di Ramsis, terjadi aksi anti pembantaian di Rab'ah oleh Aliansi Nasional. Aliansi ini bertujuan untuk melakukan protes atas apa yang telah militer dan polisi Mesir lakukan kepada para demontasi yang ada di Rab'ah dan Nahdo, yang mengakibatkan tewasnya lebih dari 2000 rakyat Mesir. Namun, aksi solidaritas ini mendapat penjagaan yang begitu besar, ditambah dengan sikap refresifnya para militer dan polisi, serta membabi butanya tembakan para militer dan polisi tersebut kepada para demonstran. Pada tragedi ini, terdapat lebih dari 80-an orang tewas, dan rata-rata yang tewas ditembak oleh sniper.<sup>202</sup>

*Kelima*, pembantaian penjara Abou Za'bal. Pada tanggal 18 Agustus 2013, masyarakat Mesir dikejutkan dengan pemberitaan atas pembantaian 38 tahanan penjara Abou Za'bal. Mulanya terdapat simpang siur dalam pemberitaan ini, namun tak lama setelah itu para ahli dan praktisi hukum, mendapatkan bukti bahwasanya 38 tahanan tersebut tewas setelah mengalami fase penyiksaan, pembakaran, dan pembunuhan sistematis.<sup>203</sup>

## 6. Kencaman berbagai negara dunia

Prilaku dan dampak berkelanjutan dari penurunan paksa Mursi menuai kecaman dan demonstrasi pengutukan besar-besaran di berbagai negara-negara

<sup>201</sup> Baca <http://lintasgavo.co/2013/07/31/pembantaian-bunderan-rabah-mesir-pun-akhirnya-terkuak>, diakses tanggal 15 Juli 2014

<sup>202</sup> Baca <http://www.islamicgeo.com/2013/08/lapangan-ramsisi-pembantaian-baru-pro.html>, diakses tanggal 15 Juli 2014

<sup>203</sup> Baca <http://www.an-najah.net/berita/internasional/tahanan-tewas-karena-ulah-aparat/>, diakses tanggal 15 Juli 2014

dunia, meskipun tidak dapat disangkal, ada beberapa negara yang mendukung atas penurunan paksa tersebut, bahkan memberikan sumbang dan santunan terhadap para militer Mesir. Sebagiaian besar negara-negara yang mengecam tindakan penurunan paksa Mursi adalah negara-negara berpenduduk muslim, antara lain: Indonesia, Iran, Sudan, Malaysia, Turki, dan lain sebagainya. Akan tetapi, ada juga beberapa negara yang non-berpenduduk muslim yang peduli dan mengecam atas tindakan dan dampak berkelanjutan dari penurunan paksa Mursi, antara lain: Uni Eropa, Venezuela,.

Negara yang berpenduduk muslim yang paling gencar dan berang atas tindakan dan dampak berkelanjutan dari penurunan paksa Mursi sebagai presiden Mesir adalah Turki. Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan, bahwasanya tindakan yang dilakukan oleh militer Mesir terhadap tindakan dan dampak berkelanjutan dari penurunan Mursi tidak dapat dibenarkan. Ia pun mengkritik OKI sebagai organisasi yang mengatas-namakan Islam, namun lamban dalam menyelesaikan masalah Mesir.<sup>204</sup>

Adapun Negara-negara non-berpenduduk muslim yang melakukan kritikan dan kecaman terhadap tindakan dan dampak dari penurunan paksa Mursi, yang berlanjut dengan penarikan Duta Besar mereka di Mesir dan atau pemanggilan Duta Besar Mesir yang ada di negara mereka masing, serta menarik yang bersifat bantuan ke Mesir, antara lain: Venezuela, Ekuador, dan sebagian kecil negara-negara di Uni Eropa, serta sikap politik yang tak terekspos oelh media lainnya.

---

<sup>204</sup> Baca

<http://internasional.kompas.com/read/2013/08/21/0406582/Turki.Israel.Ada.di.Balik.Penggulingan.Mursi>, Diakses tanggal 15 Juli 2014

Uni Eropa melalui Kepala Kebijakan Luar Negeri (Catherine Ashton) mengunjungi Mesir dan bertemu Presiden Mursi 29 Juli 2013. Akhirnya melalui pembicaraan tingkat menteri Uni Eropa pada 21 Agustus 2013 UE mengeluarkan sikap terang-terangan mengembargo militer Mesir.<sup>205</sup> Sebelumnya Menteri Luar Negeri Jerman (Guido Westerwelle) juga mengunjungi Mesir 31 Juli 2013, tetapi gagal menemui Mursi karena permintaannya ditolak pemerintah interim militer.<sup>206</sup> Uni Afrika mengambil sikap untuk menanggukhan keanggotaan Mesir serta mengunjungi Rab'ah sebagai bentuk dukungan kepada Aliansi Nasional untuk Legitimasi.

Terakhir, yang menarik adalah ketika Amerika Serikat yang dikabarkan diam-diam menghentikan bantuan militer ke Mesir. Hasil survey Pew Research Center AS menunjukkan bahwa hanya 1 dari 4 warga AS yang setuju untuk melanjutkan bantuan. Serangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan kudeta militer tidak mendapat legitimasi dari dunia internasional. Seperti diketahui bahwa berdasarkan *Foreign Assistance Act* pasal 508, AS segera menghentikan bantuan (militer) jika terjadi penggantian pimpinan pemerintahan melalui aksi kudeta.<sup>207</sup>

---

<sup>205</sup> Baca

<http://internasional.kompas.com/read/2013/08/19/1647107/Uni.Eropa.Gelar.Rapat.Darurat.Bahas.Krisis.Mesir>, Diakses tanggal 15 Juli 2014

<sup>206</sup> Baca <http://m.koran-sindo.com/node/319921>, diakses tanggal 15 Juli 2014

<sup>207</sup> Baca <http://www.pewresearch.org.2013--08--19>. "Public Backs Cutoff of Military Aid to Egypt", Retrieved 2013--08--23. Diakses tanggal 15 Juli 2014

C. Sikap Masyarakat Indonesia Terhadap Penurunan Paksa Mursi Sebagai Presiden Mesir

3. Gelombang Demonstrasi Masyarakat Indonesia Dalam Merespon Penurunan Paksa Mursi

Tindakan refresif dan dampak berkepanjangan dari penurunan paksa Mursi sebagai presiden Mesir menuai aksi demonstrasi baik berupa solidaritas, pengecaman, dan bahkan pengutukan masyarakat hampir diseluruh negara-negara dunia, tanpa terkecuali Indonesia. Dalam menyikapi permasalahan Mesir, pemerintahan Indonesia tidak terlalu banyak berkomentar, bahkan dalam beberapa statement yang dilontarkan baik dari Presiden Indonesia maupun Menteri Luar Negeri Indonesia, dinilai masyarakat Indonesia kurang tegas dalam menentukan sikap.

Pada tanggal 15 Agustus 2013, Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa, menyatakan melalui keterangan tertulisnya yang diterima Republika, "Indonesia sangat prihatin atas perkembangan terkini di Mesir yang semakin memburuk". Hal senada juga utarakan Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudoyono dalam pidato kenegaraannya<sup>208</sup> dan melalui akun Twitternya, @SBYudhoyono,<sup>209</sup> yang memiliki harapan agar krisis yang terjadi di Mesir dapat diselesaikan tanpa ada yang dirugikan serta berlangsung baik dan damai.

<sup>208</sup> Baca <http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/13/08/16/mrm5au-sby-kembali-berharap-krisis-mesir-segera-teratasi>. Diakses tanggal 15 Juli 2014

<sup>209</sup> Baca <http://nasional.kompas.com/read/2013/07/04/1047062/Respons.Krisis.Politik.Mesir.Ini.Instruksi.Presiden.SBY>. Diakses 15 Juli 2014

Sikap yang kurang tegas dan jawaban yang sarat diplomatis, membuat lapisan masyarakat Indonesia mendesak pemerintahan untuk menyatakan sikap dan tindakan yang konkrit dalam merespon isu tindakan dan dampak yang berkepanjangan dari penurunan paksa Mursi oleh oposisi dan militer. Forum Pelajar Pemuda Islam Indonesia (FPPII) se-dunia, menyatakan sikapnya, yang dibacakan oleh Sekjend FPPII se-dunia, Muhammad Dhiya. Salah satu poinnya adalah 4. Memintak pemerintahan Indonesia untuk mengoptimalkan perannya serta aktif dalam menyelesaikan konflik di Mesir<sup>210</sup>. Begitu juga sikap yang disampaikan oleh Majelis Intelektual Ulama Muda Indonesia (MIUMI) melalui Sekjednya, Bahctiar Nasir<sup>211</sup>.

Muhammadiyah, sebagai organisasi masyarakat berbasis agama Islam terbesar kedua, melauai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof Dr Din Syamsudin menyatakan “kami mendorong pemerintah untuk berpendapat dan mengambil langkah diplomasi”. Pendapat senada juga diutarakan oleh Wakil Sekjend PKS, Mahfudz Siddiq yang mendesak presiden Susilo Bambang Yudoyono untuk berada dalam barisan terdepan menyikapi konflik horizontal yang terjadi di Mesir<sup>212</sup>.

*World Islamic Society for Democracy and Humanity* (WISDOM) bersama seluruh komponen masyarakat dan tokoh masyarakat melakukan aksi besar-

<sup>210</sup> <http://www.republika.co.id/berita/komunitas/perhimpunan-pelajar-indonesia/13/08/18/mrqedc-inilah-pernyataan-sikap-fppii-sedunia-terkait-konflik-di-mesir>

<sup>211</sup> <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/07/29/mqovez-miumi-pro-mursi-mulai-dilabeli-teroris>

<sup>212</sup> Baca “PKS Minta SBY Ikut Berperan Selesaikan Konflik Mesir” Kompas.com, Nasional. Minggu 28 Juli 2013, 14:38 WIB

<http://nasional.kompas.com/read/2013/07/28/1438509/PKS.Minta.SBY.Ikut.Berperan.Selesaikan.Konflik.Mesir>. Diakses tanggal 16 Februari 2014, 13:23 WIB



besaran dalam aksi pengutukan keras kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Mesir. Disamping itu, mereka juga menuntut pemerintahan Indonesia untuk melakukan tindakan konkrit, dengan cara mendesak PBB untuk menyelesaikan masalah Mesir dan turun langsung dalam permasalahan Mesir, karena mereka melihat bahwasanya Indonesia punya hutang budi terhadap Mesir diawal-awal kemerdekaan Indonesia ditahun 1945.<sup>213</sup>

#### 4. Gelombang Demonstrasi Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia Dalam Merespon Penurunan Paksa Mursi

Mahasiswa sebagai inteligensia, yaitu sebagai sekelompok orang yang memiliki karakteristiknya sendiri, tak dapat disangkal berada di atas dan diluar tatanan sosial yang ada, baik berupa sistem kelas maupun status tradisional;<sup>214</sup> memiliki peranan tersendiri dalam pola konstelasi politik nasional maupun internasional. Sikap anomali yang terjadi di Mesir, menjadi kepedulian tersendiri bagi kaum muda khususnya mahasiswa Indonesia, terkhusus yang tergabung dalam gerakan mahasiswa Islam Indonesia, seperti: Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

Pada kasus penurunan paksa Mursi sebagai presiden Mesir pada bulan Juli 2013, yang kemudian merambat pada tragedi-tragedi berdarah di Mesir, dampak

<sup>213</sup> Baca <http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/13/08/16/mrmt7y-indonesia-mengutuk-kejahatan-kemanusiaan-di-mesir>. diakses tanggal 15 Juli 2014

<sup>214</sup> Yudi Latif. (2005). *Inteligensia Muslim dan Kuasa, Genelogi Inteligensia Muslim Indonesia Abad ke-20*. Bandung: Mizan. Hlm 18

berkelanjutan dari penurunan paksa Mursi; membangkitkan kepedulian mereka, hingga melakukan aksi-aksi guna memperlihatkan kepedulian tersebut. Beberapa aksi yang dilakukan oleh gerakan mahasiswa Islam Indonesia dalam merespon penurunan paksa Mursi sebagai presiden Mesir, antara lain adalah: pada tanggal 16 Agustus 2013, HMI, PMII, IMM, dan KAMMI bersama dengan lembaga swadaya masyarakat, komunitas dan organisasi masyarakat melakukan aksi demonstrasi agar pemerintahan Indonesia dapat bertindak proaktif dalam krisis yang dihadapi oleh Mesir, disamping itu, mereka juga menyatakan solidaritas dan kepedulian mereka terhadap apa yang terjadi di Mesir.<sup>215</sup>

Pada tanggal 28 Juli 2013 Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) melakukan aksi demonstrasi di depan Kedutaan Besar Mesir. Mereka berharap agar pemerintahan Indonesia dapat bersikap tegas dalam merespon isu di Mesir, serta adanya desakan pemerintah kepada PBB, guna menyelesaikan krisis yang di alami oleh Mesir.<sup>216</sup>

Pada tanggal 29 Juli 2013, Kelompok mahasiswa dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar aksi simpatik, di depan kantor gubernur di Mataram, Senin, sebagai bentuk kepedulian terhadap tragedi kemanusiaan di Mesir. Mereka mengutuk tindakan brutal yang mengakibatkan ratusan rakyat Mesir mati syahid, melarang intervensi militer dalam proses demokratisasi apa lagi melegitimasi kudeta dengan tindakan

---

<sup>215</sup> Baca <http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/13/08/16/mrmccf-warga-lampung-gelar-aksi-peduli-mesir>. Diakses tanggal 15 Juli 2014

<sup>216</sup> Baca <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/07/28/mqmyjn-pemerintah-kurang-tegas-sikapi-pembantaian-mesir>. Diakses tanggal 15 juli 2014

yang melanggar hak asasi manusia untuk hidup, dan mengajak kepada seluruh umat muslim dunia untuk memperbanyak do'a qunut nazilah guna keselamatan rakyat Mesir.<sup>217</sup>

Pada tanggal 29 Juli 2013, mahasiswa dari seluruh perguruan tinggi yang ada di Surabaya, yang tergabung dalam "Aliansi Mahasiswa Indonesia Peduli Mesir", melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Graha. Mereka menyatakan sikap penolakan atas pengkudetaan militer terhadap Mursi sebagai presiden sah Mesir, yang dipilih secara demokratis; dan mereka juga mengkritik PBB dan mengharapkan PBB dapat melakukan tindakan tegas terhadap hal ini, karena sangat menyalahi nilai demokrasi.<sup>218</sup>

Pada tanggal 16 Agustus 2013, KAMMI Aceh bersama dengan warga Aceh yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Aceh Peduli Mesir (AMAPeM) melakukan aksi demonstrasi guna menuntut dunia internasional, terkhusus PBB yang memiliki otoritas penuh, untuk dapat menyelesaikan permasalahan Mesir, adapun mereka juga berharap agar pemerintahan Indonesia dapat bersikap tegas dan proaktif dalam permasalahan Mesir, dan aksi demonstrasi pun diakhiri dengan sholat ghoib di depan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh<sup>219</sup>.

---

<sup>217</sup> Baca <http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/13/07/29/mqouxr-kammi-ntb-kecam-aksi-kekerasan-di-mesir>. Diakses tanggal 2014

<sup>218</sup> Baca <http://www.dakwatuna.com/2013/07/30/37402/mahasiswa-surabaya-gelar-aksi-tolak-kudeta-militer-di-mesir/#axzz38EQIGfCO>. Diakses tanggal 17 Juli 2014

<sup>219</sup> Baca "Peduli Mesir, Sholat Ghoid di Banda Aceh Diwarnai Isak Tangis", Kompas.com, Regional. 16 Agustus 2013, 13:39 WIB.

<http://regional.kompas.com/read/2013/08/16/1339469/Peduli.Mesir.Shalat.Ghaib.di.Banda.Aceh.Diwarnai.Isak.Tangis>. Diakses 16 Februari 2014, 13:45 wb

Pada tanggal 16 Agustus 2013, KAMMI Tanjung Pinan-Bintan, kepulauan Riau, melakukan aksi peduli Mesir. Pada aksi peduli tersebut, para aktivis KAMMI mengajak seluruh pengendara motor maupun mobil untuk membunyika klakson kendaraan mereka, sebagai bentuk simbol kepedulian dan keprihatinan terhadap apa yang terjadi di Mesir.<sup>220</sup>

Pada tanggal 16 Agustus 2013, beberapa organisasi dan komunitas seperti Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK), BEM Seluruh Indonesia (SI), Forum Lingkar Pena (FLP), Komunitas sepatu roda, bomber, beat boxer, dan Garuda Keadilan; membuat suatu aliansi Sahabat Peduli Kemanusiaan (SPK). Mereka mengadakan malam kemanusiaan yang dikemas dengan pertunjukan yang kental akan nilai seni dan budaya, sebagai bentuk ekspresi kepedulian mereka terhadap peristiwa yang terjadi di Mesir. Disamping itu, mereka mengkritik keras atas apa yang telah terjadi di Mesir dan juga mendesak pemerintahan Indonesia untuk bertindak tegas.<sup>221</sup>

Dari berbagai aksi-aksi yang dilakukan oleh gerakan mahasiswa Islam baik sebagai motor penggerak maupun hanya sebagai bagaian yang ikut melakukan aksi tersebut, intensitas dan keterlibatan KAMMI sebagai salah satu gerakan mahasiswa Islam Indonesia sekaligus organisasi masyarakat, terlihat lebih dominan dari pada gerakan mahasiswa Islam Indonesia yang lainnya. Keterlibatan

---

<sup>220</sup> Baca "Peduli Mesir, KAMMI ajak Pengendara Bunyikan Klakson", Kompas.com, Regional. 16 Agustus 2013, 20:50 WIB.  
<http://regional.kompas.com/read/2013/08/16/2050233/Peduli.Mesir.KAMMI.Ajak.Pengendara.Bunyikan.Klakson>.

<sup>221</sup> Baca <http://www.dakwatuna.com/2013/08/18/38120/sahabat-peduli-kemanusiaan-gelar-aksi-peduli-mesir/#axzz38EQIGfCQ>. Diakses tanggal 17 Juli 2014

dan intensitas KAMMI sebagai gerakan mahasiswa Islam Indonesia yang begitu massif dan hampir menyeluruh di daerah-daerah Indonesia tersebut, menimbulkan rasa ingin tahu mengenai kenapa keterlibatan dan intensitas KAMMI dalam merespon penurunan paksa Mursi begitu massif, padahal sementara KAMMI sendiri tidak ada hubungan strukturalis maupun organisatoris antara KAMMI dengan Ikhwanul Muslimin yang menjadi pendukung utama Mursi.

Independensi KAMMI sebagai gerakan mahasiswa Islam Indonesia sekaligus organisasi masyarakat dapat di lihat pada Anggaran Dasar (AD) KAMMI pada pasal 5 BAB II yang berbicara mengenai Asas, Sifat, Visi dan Misi, menyebutkan dengan jelas bahwasanya KAMMI merupakan organisasi bersifat terbuka dan independen<sup>222</sup>. Dari landasan konstitusi KAMMI tersebut, dapat difahami bahwasanya KAMMI merupakan organisasi masyarakat atau gerakan mahasiswa yang tidak berafiliasi kemanapun.

---

<sup>222</sup> Lihat *Hasil-hasil MUKTAMAR VII KAMMI*, Banda Aceh 13-18 Maret 2011. Mengenai AD/ART KAMMI, Hal 93